

artikel roni oksuntri

by Jaka Dernata

Submission date: 11-Mar-2024 05:33AM (UTC+0530)

Submission ID: 2285499651

File name: ARTIKEL_PUBLIKASI.docx (71.54K)

Word count: 4850

Character count: 33152

1
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DPRD DALAM
 MENINGKATKAN PUBLIKASI KEGIATAN DPRD
 KABUPATEN KAUR**

Roni Oksuntri ¹⁾ Henny Aprianty ²⁾ Rahimandani ³⁾

¹⁾Mhs S2 MAP FISIP, ² dan ³⁾ Dosen S2MAP FISIP Unihaz Bengkulu

Alamat email: roksuntri@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Kaur Upaya Humas dan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan publikasi karya DPRD dilakukan dengan meliput dan mempublikasikan kerja-kerja pimpinan dan anggota DPRD serta berbicara kepada masyarakat agar mengetahuinya. apa yang telah dilakukan. Keputusan ini dikeluarkan oleh badan legislatif Republik Demokratik Rakyat Korea dengan kekuasaan legislatif untuk tahun 2019-2024. diberikan oleh masyarakat.. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaur, antara lain sinyal internet yang buruk, seringnya listrik padam, staf jurnalistik di bagian humas dan protokol yang tidak ada, dan sikap masyarakat Kabupaten Kaur yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan wakil rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami implementasi kebijakan Bagian Humas DPRD untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Kaur dengan menggunakan pemikiran George C. Edward III. Inilah yang kami lakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, tinjauan pustaka dan triangulasi. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan Bagian Humas Sekretariat DPRD untuk meningkatkan publikasi karya DPRD Kabupaten Kaur yang diteliti dengan menggunakan konsep Edward III diterapkan secara luas.

Kata Kunci : Implementasi, Humas dan Publikasi.

ABSTRACT

1
 The activities of the DPRD public relations and secretariat section to increase the publication of Kaur Regency DPRD activities are carried out to cover and publish activities carried out by DPRD leaders and members to be conveyed to the public so that the public can know about the activities carried out by DPRD members for the 2019-2024 term as bearers of the legislative mandate. that society has given. There are many problems that occur in the implementation of coverage and publication of the activities of the leaders and members of the Kaur Regency DPRD, including poor internet signal, frequent power outages, journalistic staff in the public relations department and protocols that do not exist, and the attitude of the people in Kaur Regency that does not follow activities carried out by the people's representatives. The aim of this research is to describe and understand the implementation of policies in the public relations section of the DPRD secretariat to increase the publication of Kaur Regency DPRD activities which will be studied using George C. Edward III's theory. The research method uses a qualitative research approach. Data collection was carried out by interviews, observation, documentation studies and triangulation. The conclusion of this research is that the implementation of policies by the public relations section of the DPRD secretariat to increase the publication of Kaur Regency DPRD activities which are studied using Edward III's theory is quite good.

Keywords: Implementation, Public Relations and Publication.

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai banyak hal yang harus dilakukan untuk menawarkan layanan publik yang berkualitas kepada semua warga negara berdasarkan hukum. Untuk pasal 25 pasal 1 UU Pelayanan Publik Tahun 2009, pengertian Pelayanan publik dalam arti hukum adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan masyarakat umum dalam hal barang dan jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyedia layanan publik. Sebagai salah satu prioritas nasional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sudah sewajarnya bagi penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun kenyataannya, masyarakat seringkali tidak puas dengan pelayanan publik di Indonesia (Ariany and Putera 2013).

Permasalahan yang sering dibicarakan dalam masyarakat saat ini adalah kurangnya pelayanan pemerintah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Menurut (Andhika 2018) Pembangunan pelayanan publik selalu inovatif karena permasalahan pelayanan publik merupakan bagian yang paling terlihat dalam pekerjaan pemerintah. Sebagai pengatur pelayanan publik, sulit bagi pemerintah untuk memberikan kualitas yang baik kepada masyarakat jika tidak termotivasi dan melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Hal ini karena seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap layanan semakin meningkat.

Akibat buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia dan berbagai permasalahan Hal ini harus diikuti dalam kaitannya dengan urusan publik reformasi birokrasi yang mampu melakukan reformasi dan perubahan mendasar dalam sistem manajemen pemerintahan, khususnya pada kelembagaan (manajemen) dan (proses bisnis) dan faktor manusia (Kurmiawan 2016). Alat sisi sumber daya. Dalam penyelenggaraan Pekerjaan umum dan reformasi birokrasi saja tidak cukup untuk mencapai tujuan besar yang ditetapkan pemerintah daerah.

Saat ini, kiprah penguasa terlihat dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Instansi pemerintah, khususnya Republik Demokratik Rakyat Korea, sering dikritik

oleh masyarakat karena dianggap sebagai lembaga yang sangat bermusuhan dengan penduduk kota. Menurut (Nida 2014) Masyarakat semakin menyadari kehadiran media yang dapat menimbulkan opini negatif dan positif di masyarakat dengan menggambarkan tindakan pemerintah secara akurat. Peran Humas adalah menciptakan informasi yang baik agar informasi yang disampaikan murni sehingga masyarakat tidak menimbulkan simpang siur terhadap kegiatan pemerintah itu sendiri.

Peran Humas DPRD Baik dan laporan akurat penting bagi pekerjaan dan kegiatan Republik Demokratik Rakyat Korea Peran media adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Sekretariat Humas DPRD Kabupaten Kaur mempunyai kantor dan fungsi di dalam dan di luar DPRD Kabupaten Kaur fungsi pelaporan, penulisan dan pelaksanaan komunikasi sebagai mediator, protokoler dan koordinator. Menurut (Dr. H. Zaenal Mukarom and Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos. 2015) humas pemerintah sifatnya sangat apolitis dan departemen humas lembaga pemerintah dibentuk untuk mengumumkan dan mempublikasikan kebijakan yang diumumkan oleh DPRD.

Karena salah satu kegiatan kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur adalah untuk mencapai tujuannya dengan memperbanyak publikasi yang dapat memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, maka diperlukan perencanaan kehumasan yang efektif dan bermanfaat. Terkait kajian implementasi kebijakan publik untuk meningkatkan kerja DPRD di Sekretariat Kabupaten Kaur, observasi peneliti menunjukkan banyak permasalahan yang sering terjadi pada lembaga kehumasan ketika mengelola Sistem Informasi Nasional. Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur yaitu :

1. Namun pengelola humas dapat menyebarkan informasi mengenai kegiatan DPRD kepada masyarakat secara terbatas.
2. Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur lamban menyikapi tindakan DPRD secara terbuka.
3. Kualitas sumber daya manusia pada Departemen Humas Sekretariat Republik Demokratik Rakyat Korea sangat rendah.

Membangun hubungan yang seimbang dengan media adalah salah satu Tindakan untuk mencapai

tujuan Anda hubungan masyarakat Anda. Hubungan dewan dan media bukanlah hubungan struktural yang mengharuskan institusi saling berhubungan, namun kedua institusi saling membutuhkan untuk menjalin hubungan terutama di bidang komunikasi dan pengelolaan masyarakat.

Badan legislatif (dalam hal ini DPRD Kabupaten Kaur) membina hubungan dengan media. Hal ini penting karena media dapat mempengaruhi opini masyarakat. Perlu diingat bahwa peran dan fungsi pers diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan lembaga legislatif dalam kaitannya dengan kewenangan administratif dan fungsi legislatif sebagai pembentuk undang-undang daerah. Inspeksi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Hakikat komunikasi itu luas, luas dan bermakna, karena komunikasi adalah keseluruhan proses mempengaruhi pikiran seseorang kepada orang lain. Selain kemampuan berkomunikasi, petugas humas Sekretariat Seharusnya DPRD Kabupaten Kaur memanfaatkan media massa dengan baik dan tidak.

1 Fokus penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan Humas DPRD DPRD dalam meningkatkan visibilitas kegiatan DPRD di Kabupaten Kaur periode 2019-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami implementasinya kebijakan Departemen Humas Departemen Dalam Negeri DPRD untuk meningkatkan presentasi kegiatan DPRD di wilayah Kaur di daerah. periode 2019-2024. Untuk menganalisis topik penelitian ini, peneliti George menggunakan model implementasi kebijakan (Edwards 1984) yaitu dari atas ke bawah. Edward III membuat daftar dampak langsung dan implikasi model kebijakannya terhadap implementasinya. Menurut teori George C. Edward III Edward III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi politik. Antara lain:

1. Komunikasi

Menurut (Ramdhani 2016), efektivitas implementasi kebijakan paling dipengaruhi oleh komunikasi. Artinya komunikasi, atau hubungan baik antara pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, serta komunikasi dengan kelompok sasaran. Politisi harus menerapkan kebijakan secara efektif. memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan baik dari segi

teknis, latar belakang, dan ideologi. Apapun tujuan, sasaran atau sasarannya, kurangi distorsi dalam implementasi yang berujung pada tidak terlaksananya kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi yang disebutkan Edward III perlu diperhatikan tiga hal yaitu komunikasi, konsistensi dan kejelasan.

2. Sumber daya

Sektor sumber daya juga memainkan peran penting bagian dalam aplikasi kebijakan. Edward III melihat ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kerja kebijakan antara lain jumlah pegawai (employees), kualitas pelatih, ketersediaan informasi mengenai isu-isu yang mempengaruhi pengambil kebijakan dan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Itu telah meningkat. Anggaran dan sumber daya berfungsi. Energi yang diberikan dari sumber-sumber tersebut harus bergantung pada tingkat permasalahan, pencapaian dan jumlah tujuan yang ingin dicapai.

3. Disposisi,

Gaya yang dibicarakan di sini berkaitan dengan karakter dan karakteristik pelatih. Kehendak pembuat undang-undang, seperti halnya kredibilitas dan sifat demokratis. Ini adalah salah satu variabel utama implementasi kebijakan. Apabila pelatih dalam keadaan baik maka kebijakan yang diterapkan akan sesuai dengan harapan pemegang polis. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan-kebijakan yang baik kadang-kadang melenceng atau mencapai sasaran yang salah karena ulah para pengambil kebijakan. Dengan kata lain, kemauan dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat penting pada saat ini. Menurut Erna dalam (Ramdhani 2016) penampilan dan perilaku Pembina, meskipun komunikasinya baik, namun jika perilakunya tidak ditunjang dengan sikap yang baik maka tidak akan ada implementasi politik yang efisien.

4. Struktur Birokrasi

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur organisasi. Ketika bahannya bagus atau sangat bagus maka kebijakan harus dilaksanakan, dan ketika kebijakan diterapkan, Eduardo III menyatakan bahwa struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan publik. Kebijakan terkadang sangat kompleks dan memerlukan kerja sama banyak orang. Hal ini karena struktur birokrasi yang tidak membantu, seringkali kekurangan sumber daya, membuat implementasi kebijakan menjadi sulit. Birokrasi bertanggung jawab atas perumusan kebijakan seperti: Kami mendukung kebijakan. Kebijakan dibuat terlebih dahulu dan diputuskan melalui koordinasi yang tepat.

12

METODE PENELITIAN

Penyelidikan ini menggunakan metode kualitatif. Investigasi kualitatif adalah jenis investigasi yang digunakan untuk mengkaji hakikat suatu hal. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk mendeskripsikan cara kerja berdasarkan fakta lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan apabila terjadi tanda, peristiwa, dan fakta di lapangan (Lexy J. Moleong 2018). Kajian yang dilaksanakan di Bagian Humas DPRD Kabupaten Kaur ini terfokus pada bidang kehumasan yang mempublikasikan karya para pimpinan dan anggota DPRD periode 2019-2024 yang beralamat di Padang. Kempas, Kabupaten Kaur.

Menurut (Sugiyono 2016) Kualitatif Untuk penelitian, data dipilih dari sumber (sampel) yang digunakan. Metode seleksi bola salju adalah metode sumber data Proyek Penelitian. Sumber data yang Anda pilih disebut data primer. Sumber informasi penelitian ini adalah kelompok anggota yang terkait dengan DPRD, sekretariat DPRD, media massa dan statistik sosial.

Menurut (Sugiyono 2015) Informasi yang diperoleh melalui metode ini diharapkan dapat tersebar dan terus bertambah sehingga masalah menjadi jelas, sehingga informan dalam penelitian ini terdapat pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam permasalahan penelitian yang berkaitan dengan implementasi aktor. Kebijakan Humas dalam Publikasi Operasional, Anggota DPRD. Selain itu, dipilih 6 orang sebagai informan kunci, antara lain kelompok Sease Sijean, Group Kaur Kondusif, Sekretaris Dewan, Humas, Media Cetak Radar Kaur dan Aktivistis Komunitas.

Data berdasarkan masalah dan tujuan Anda. Koleksi tersedia untuk penelitian ini dikumpulkan melalui Pertanyaan internal. Sebagai teknik wawancara, gunakan panduan wawancara

komprehensif yang hanya berisi petunjuk umum tentang proses dan topik sehingga topik utama wawancara terabaikan dan topik yang diinginkan terpenuhi (Arikunto 2006). Selain itu, teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan data atau keakuratan hasil survei, temuan dan dokumen.

15

Untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam penelitian ini digunakan metode analisis data berdasarkan analisis interaktif. Model ini dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Metode analisis interaktif ini mencakup empat langkah analisis: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi. Seluruh siklus proses analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles and Huberman 1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber, wawancara langsung di kantor DPRD Kabupaten Kaur dan pemantauan langsung kegiatan DPRD di berbagai distrik di Kabupaten Kaur, link promosi proyek Sekretariat DPRD. Meliput dan mempublikasikan kegiatan anggota DPRD serta mengumpulkan informasi dalam bentuk artikel tertulis dan wawancara tentang kegiatan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kaur.

Cari tahu bagaimana Program Hubungan Menteri DPRD menangani informasi dan masukan. Tindakan para anggota DPRD akan dianalisis dan dianalisis berdasarkan berbagai faktor yang mengukur dan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini mengikuti teori Jorge Eduardo III:

1. Komunikasi;
 - Konsistensi informasi yang diterima para pimpinan politik Departemen Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur baik, serupa, sulit atau berbeda untuk meliput dan mempublikasikan karya anggota dan pimpinan DPRD. Komunitas adalah buletin online Anda. Radar Kaur Media juga memberikan informasi yang berkualitas, konsisten dan transparan kepada masyarakat.
2. Sumber daya (Staff, Informasi, Wewenang, Fasilitas);

Dari status kualitatif dan kuantitatif personel dalam pelaksanaan kebijakan Dalam pemberitaan dan publikasi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD, Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur. Bertindak sebagai pelaksana mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai keterampilan yang bagus.

Informasi yang diberikan oleh aktor politik dan tujuan politiknya sangat jelas. Terkait dengan perintah dan pembatasan yang terdapat dalam kebijakan Kabupaten Kaur, Bagian Humas DPRD DPRD akan melaporkan kegiatan anggota dan pimpinan DPRD serta memfasilitasi akses terhadap pimpinan politik dan regulator mengenai permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberitaan dan publikasi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD, serta pelaksana yang terlibat menggunakan kekuasaannya sesuai dengan kewenangannya. tanggung jawab mereka Sesuai SOP.

Sarana dan prasarana pendukung Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur serta penyelenggaraan infrastruktur politik dalam pemberitaan dan publikasi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD sudah cukup memadai, bahkan seluruh informasi dan akses terhadap informasi dan informasi sudah cukup memadai. publikasinya dapat digunakan di Internet.

Personel, informasi, lembaga, dan layanan pendukung yang menerapkan praktik ini, dapat disimpulkan bahwa sumber daya aplikasi berfungsi dengan baik dan tersedia dengan baik..

3. Disposisi;

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan sosial mampu melaksanakan kebijakan kehumasan dalam menghasilkan karya para anggota dan pimpinan DPRD, atas dasar kebenaran. Dapat disimpulkan bahwa tingkat demokrasi dan pertukaran informasi dalam implementasi kebijakan promosi kerja di Republik ¹Demokratik semakin membaik. Menjalin komunikasi dan informasi yang baik antar anggota DPRD, Sekretariat DPRD khususnya Bagian Humas, Media Internet Radar Kaur dan Publikasi Berita Harian Kabupaten Kaur.

Begitu pula dengan Kabupaten Kaur. keinginan untuk merasakan kebenaran dan kebenaran. Terkait tingkat demokrasi dan pertukaran informasi, sikap seluruh pemimpin politik adalah tegas, jujur, dan demokratis dalam bekerja, sehingga sangat Tahu cara berbagi informasi.

4. Struktur birokrasi.

SOP pelaksanaan Departemen Humas DPRD, menghimpun dan mempublikasikan kegiatan para anggota dan pengurus DPRD dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kaur, dengan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Hubungan Masyarakat dan Protokol. Bagian ini harus memberikan informasi kepada pegawai dan mitra terkait yang meliput dan mempublikasikan hasil kerja DPRD. Organisasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan Kantor Hubungan Masyarakat Sekretariat Republik Demokratik Rakyat Korea yang meliput dan mempublikasikan urusan anggota dan pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea juga dapat dikelola secara efektif.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian (tanggung jawab bersama) juga dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan Bagian Humas Sekretariat DPRD berkembang tanpa kendala. Bagian yang menghimpun dan mempublikasikan hasil karya anggota dan pimpinan DPRD berfungsi normal. Terdapat standar operasional (SOP) dan tanggung jawab pekerjaan yang jelas untuk setiap bagian terkait.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan langkah kebijakan Departemen Humas Sekretariat DPRD Korea dalam meningkatkan publikasi karya DPRD Kabupaten Kaur menunjukkan hasil yang baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan di banyak bidang dan bidang informan, pengamatan langsung di lapangan selama kegiatan DPRD diliput dan dipublikasikan, serta dari pemeriksaan dokumen pendukung yang diperlukan.

Fungsi dan indikator pada bagian ini perlu digunakan untuk memperjelas pelaksanaan kebijakan Seksi Humas DPRD untuk meningkatkan prestasi kerja DPRD di Kabupaten Kaur. Syarat

yang diterangkan dalam penelitian adalah berkaitan dengan pelaksanaan dasar Seksi Perhubungan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan prestasi DPRD Kabupaten Kaur sesuai dengan konsep komunikasi, sumber daya, gaya George Edward III. dan struktur Pejabat.

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk implementasi kebijakan pada bagian kehumasan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Kaur tentang cara mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada pengurus dan masyarakat serta sikap dan reaksi pihak-pihak yang terlibat kebijakan tersebut.

Komunikasi merupakan hal mendasar Berhasil mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Pro⁶ ini efektif ketika pengambil keputusan mengetahui apa yang mereka lakukan. Segala keputusan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dikomunikasikan (atau dikomunikasikan) kepada departemen SDM yang sesuai sehingga mereka dapat berkomunikasi secara efektif dan memahami apa yang perlu dilakukan. Pengambil keputusan perlu berkomunikasi pelaksana dapat menerapkan semua kebijakan yang telah ditetapkan di masyarakat dengan lebih baik.

Komunikasi merupakan sarana utama pelaksanaan kebijakan Bagian Humas Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kegiatan DPRD di wilayah Kaur. Komunikasi mempengaruhi kebutuhan pelaksana kebijakan dalam memenuhi tugasnya guna menjamin keberhasilan hasil kebijakan. Misi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan.

Ada tiga dimensi untuk mengukur keberhasilan komunikasi :

- a. setiap orang Setelah informasi diberikan dan dikomunikasikan, implementasi yang efektif dapat dicapai. Kecenderungan yang terjadi ketika memberikan informasi adalah kebingungan atau kebingungan terhadap topik utama yang dibicarakan. Hal ini karena komunikasi membutuhkan waktu, sehingga informasi yang diharapkan terkadang terabaikan atau disalahpahami.
- b. Jelasnya, informasi yang diberikan kepada pembuat kebijakan harus terorganisir dengan baik, transparan dan netral. Tidak ditandai

Kontinuitas, Komunikasi Dalam melakukan hal ini, perintah harus konsisten dan jelas. Sebab, seringkali terjadi perubahan pesanan dapat mengganggu pelaksanaan di lapangan...

Sifat interaktif implementasi kebijakan Departemen Humas DPRD dalam meningkatkan kerja DPRD di Kabupaten Kaur terlihat dari hasil dan kejelasan titik distribusi hak pengawasan. Komunikasi konsisten dan semuanya berjalan dengan baik. Baik Dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan (kantor) dan berlanjut hingga menjadi tempat musyawarah akhir bersama masyarakat untuk mengetahui kiprah yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaur.

Tiga tanda yang perlu diubah adalah ucapan dan kejelasan. Salah satu yang perlu diperbaiki dalam penyaluran informasi tersebut adalah Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur. Idenya adalah untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil dapat berkomunikasi dan memahami Apa yang terjadi Anggota DPRD Kabupaten Kaur. Anda dapat mendownload konten, media sosial, bantuan pekerjaan rumah, dll.

2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya adalah kapasitas dan alat untuk melaksanakan kebijakan publik. Sekalipun komunikasi berjalan lancar, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efisien dan efektif tanpa sumber daya yang memadai, baik kualitatif maupun kuantitatif (Dinata, 2021; 100). Indikator sumber daya pribadi, informasi, dll, izin dan fasilitas.

- a. setiap orang Pegawai merupakan sumber daya terpenting bagi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mungkin gagal jika staf tidak cukup atau kurang berpengalaman dalam menjalankan peran mereka. Tidaklah cukup hanya dengan menambah jumlah pekerja dan editor, namun agar kebijakan itu sendiri dapat melaksanakan tugasnya, diperlukan cukup pekerja dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Ada dua jenis informasi: informasi terkait implementasi kebijakan. Informasi tentang

- data kepatuhan pelatih serta undang-undang dan peraturan pemerintah.
- c. Kontrol bersifat top-down untuk mengontrol ketertiban. Wewenang adalah kekuasaan atau kewenangan langsung terhadap pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan.
 - d. Bangunan, jalan dan infrastruktur sangat penting untuk implementasi kebijakan. Jika Anda memiliki cukup staf dan wewenang untuk melakukan pekerjaan namun tidak ada ruang dukungan, penerapan kebijakan tidak akan berhasil...

Dari hasil wawancara tatap muka serta observasi lapangan terhadap personel, informasi, wewenang dan alat pelaksanaan kebijakan Dorongan Kantor DPRD untuk meningkatkan keterbukaan kegiatan DPRD di Kabupaten Kaur menunjukkan bahwa sumber daya sudah mencukupi. sekolah dan 10 orang sisanya bergelar Sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berbanding lurus dengan keterampilan pengambil politik Untuk memperkuat publisitas kegiatan DPRD di Kabupaten Kaur, Bagian Humas Sekretariat DPRD.

Informasi pelaksanaan kebijakan Sekretariat Humas DPRD Kabupaten Kaur Untuk meningkatkan kinerja DPRD Kinerja DPRD sangat mudah dicapai dan hasil dari menunjukkan kinerja anggota DPRD cukup bagus. Dalam pelaksanaannya, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan selalu menggunakan kewenangannya secara wajar, penyalahgunaan kewenangan staf hubungan dan protokol atau kewenangan yang tidak digunakan sesuai keinginan dalam melaporkan dan mempublikasikan kegiatan anggota dari DPRD.

Potensi implementasi politik Bagian Humas Sangat baik bagi Kantor DPRD untuk meningkatkan kegiatan DPRD di Kabupaten Kaur. Tentu saja, opsi penempatan cukup untuk kendaraan, perlengkapan penerbitan, dan fasilitas lain yang mencerminkan aktivitas anggota DPRD Laptop, sinyal internet, grup WhatsApp, email dari jejaring sosial (Facebook dan Instagram), dll.

3. Aspek Disposisi

Ciri-cirinya meliputi ciri-ciri dan ciri-ciri kepribadian seperti kejujuran, integritas, dan sifat demokratis seorang karyawan. Jika regulator dalam keadaan baik maka regulator dapat mencapai kebijakan yang diinginkan oleh pengambil ke17kan. Tampaknya, dalam satu atau lain hal, hal ini adalah salah satu faktor terpenting dalam implementasi kebijakan. Jika pelatih mempunyai sikap, sikap atau dukungan yang positif terhadap implementasi kebijakan, besar kemungkinan kebijakan tersebut akan diimplementasikan Namun, jika pe4gusul kebijakan Jika Anda mempunyai opini negatif atau menolak menerapkan kebijakan karena adanya konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan tersebut mungkin akan terpengaruh.

Sikap menerima a16 menolak pengusul kebijakan Hal ini mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena politik tidak dibuat oleh masyarakat yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat. Namun, karena kebijakan publik sebagian besar bersifat top-down, para pengambil keputusan mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan suatu kebutuhan, kebutuhan, atau masalah tertentu. Masalah ini perlu diperbaiki.

Oleh karena itu, ada banyak tingkat kejujuran dan integritas, serta tingkat demokrasi. Pelatih harus sangat jujur dan dapat dipercaya. Komitmen yang kuat dari para 11najer akan memungkinkan mereka Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kejujuran membantu para profesional menghindari penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

Saat ini reliabilitas dan validitas dapat diukur melalui Tingkat konsistensi antara pedoman dan peraturan ditentukan oleh regulator dan pengambil kebijakan. Semakin banyak peraturan dan pedoman yang diikuti, semakin besar komitmen advokat terhadap kewajiban penegakan kebijakan. Di sisi lain, tingkat demokrasi dapat diukur dengan melihat kemampuan para aktor dalam mengelola pooling dan koordinasi dengan kelompok sasaran. Di sini, pencarian solusi terhadap

situasi terkait pekerjaan berdasarkan tujuan dan sasaran proyek menjadi lebih transparan dan terbuka.

Sebelumnya kita telah membahas tentang kejujuran, integritas, dan demokrasi para pembuat kebijakan. Bagian Hubungan Sekretariat DPRD Kita melihat adanya peningkatan publisitas mengenai kegiatan DPRD di Kabupaten Kaur di masyarakat. Bagian Humas dan Protokol secara berkala melakukan sharing, pertemuan atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain anggota DPRD, staf humas dan protokoler, serta staf media periklanan, merekalah yang akan melakukan pekerjaan tersebut, sebelum membuat iklan tersebut. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa implementasi Humas Kantor Demokrasi dalam meningkatkan output kerja DPRD di Kabupaten Kaur.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Para pembuat kebijakan mengetahui apa yang perlu dilakukan, mempunyai kemauan dan sumber daya untuk melakukannya, namun sering kali terhambat oleh struktur kelemahan yang mereka gunakan. Dua aspek kunci birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan pemisahan operasi kompleks dan besar. Struktur organisasi seperti ini seringkali ada karena kekakuan birokrasi. Sekalipun terdapat sumber daya yang cukup untuk menerapkan suatu kebijakan, dan para perencana mengetahui cara melakukannya serta ingin melakukannya, penerapan kebijakan mungkin tidak efektif karena struktur administratif yang tidak memadai.

Implementasi kebijakan mungkin tidak efektif dalam menerapkan inovasi. Dalam layanan pembayaran pajak mobil. Aspek struktur organisasi meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan segregasi. Struktur administratif yang panjang melemahkan kontrol dan mengarah pada birokrasi, yaitu prosedur administrasi yang rumit dan rumit sehingga menyulitkan pengelolannya.

Menurut Winarno (2014), dengan adanya SOP diharapkan dapat membuat pengambil kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang ada, menyelaraskan aktivitas PNS Dalam organisasi yang kompleks dan

terdistribusi tercipta fleksibilitas dan kesetaraan yang besar. dalam implementasi peraturan.

Menurut Widodo (2013), jika SOP-nya tidak jelas, apakah mengacu pada sistem implementasi kebijakan, mekanisme atau prosedur, Pembagian peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab utama antara aktor dan organisasi. Kurangnya keselarasan hubungan antar organisasi pelaksana, menyebabkan terjadinya kegagalan dalam implementasi politik. Ketika SOP jelas, menentukan kebutuhan sumber daya menjadi lebih mudah. Selain itu, SOP implementasi kebijakan menjadi lebih jelas dan memudahkan para pelaku kebijakan dalam memahami, memahami dan mendalami kebijakan terkait tujuan, pendekatan, kelompok sasaran dan kemungkinan outcomenya. dan apa yang bisa dinikmati darinya. dan aktor dan organisasi politik. Situasi seperti ini memudahkan untuk Tentukan pemikiran dan organisasi Anda untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Widodo (2013), fragmentasi dapat meningkatkan kegagalan komunikasi karena struktur kantor yang terfragmentasi dapat membatasi kemampuan pejabat untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan meningkatkan keuntungan, sehingga menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sumber daya yang langka. Fase segmentasi menunjukkan bahwa struktur kantor yang terfragmentasi dapat mendistorsi saran regulator dan meningkatkan gangguan komunikasi.

Fragmentasi dapat membatasi kemampuan pejabat senior untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang diperlukan dalam suatu lembaga sehingga menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sumber daya yang langka. Lembaga penegakan hukum yang terfragmentasi (terfragmentasi atau sedikit demi sedikit) dapat menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan. Pemerintahan yang terdesentralisasi akan lebih terkoordinasi dan memiliki peluang untuk memfasilitasi komunikasi yang dapat memperlambat implementasi kebijakan.

Untuk meningkatkan kerja DPRD di distrik Kaur, Departemen Humas DPRD menerapkan kebijakan dan menjadi kerangka

pengelolaan donor. karir yang baik Seluruh pegawai mempunyai penjelasan yang jelas mengenai tugasnya dalam melaksanakan pelaksanaan pengumuman tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat kerja yang ditulis Sekretaris DPRD Kabupaten Kaur yang merupakan penerus Ketua DPRD Kabupaten Kaur.

Di lapangan, eksekusi publikasinya juga sudah baik. Ada pembagian kerja yang jelas bagi setiap orang, begitu pula petugas humas sekretariat Republik Demokratik Rakyat Korea mempunyai tugasnya masing-masing, dan kewajiban media jelas pada saat siaran. laporkan dan laporkan di situs.

Dalam proses peningkatan publisitas kegiatan sekaligus pelaksanaan kebijakan Departemen Humas Sekretariat DPRD, dilakukan pembedaan antara humas dan protokoler DPRD DPR dan mitra (surat kabar dan buletin online) Kaur DPRD Kabupaten bisa bekerja dan berbagi. Tanggung jawab terpenuhi dengan baik, tugas dan tanggung jawab tidak tumpang tindih. Ia bertanggung jawab untuk memajukan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Kaur.

KESIMPULAN

Dalam memajukan kegiatan Republik Demokratik Rakyat Korea, implementasi kebijakan kehumasan Sekretariat Republik Demokratik Rakyat Korea dipelajari dari empat bidang dengan menggunakan teori George Edward III :

1. Komunikasi;

Konsistensi informasi yang diterima para pimpinan politik Departemen Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur baik, sejenis, sulit atau berbeda untuk meliput dan mempublikasikan kegiatan anggota dan pimpinan DPRD. Komunitas adalah buletin online Anda. Radar Kaur Media juga memberikan informasi yang berkualitas, konsisten dan transparan kepada masyarakat.

2. Sumber daya (Staff, Informasi, Wewenang, Fasilitas);

Dari status kualitatif dan kuantitatif personel dalam pelaksanaan kebijakan Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur yang melaporkan dan mempublikasikan kegiatan anggota dan pimpinan DPRD dapat mengambil keputusan sebagai berikut personel yang

bertindak sebagai pelaksana mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai keterampilan yang baik.

Informasi yang diberikan oleh aktor politik dan tujuan politiknya sangat jelas. Terkait dengan perintah dan pembatasan yang terdapat dalam kebijakan Kabupaten Kaur, Bagian Humas DPRD DPRD akan melaporkan kegiatan anggota dan pimpinan DPRD serta memfasilitasi akses terhadap pimpinan politik dan regulator mengenai permasalahan tersebut. kepentingan publik. Kegiatan anggota dan pemimpin Republik Demokratik Rakyat.

Dalam pelaksanaan kebijakan Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberitaan dan publikasi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD, serta pelaksana yang terlibat menggunakan kekuasaannya sesuai dengan kewenangannya. tanggung jawab mereka Sesuai SOP.

Sarana dan prasarana pendukung Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur serta penyelenggaraan infrastruktur politik dalam pemberitaan dan publikasi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD sudah cukup memadai, bahkan seluruh informasi dan akses terhadap informasi dan informasi sudah cukup memadai. publikasinya dapat digunakan di Internet.

Personel, informasi, lembaga, dan layanan pendukung yang menerapkan praktik ini, dapat disimpulkan bahwa sumber daya aplikasi berfungsi dengan baik dan tersedia dengan baik..

3. Disposisi;

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan sosial mampu melaksanakan kebijakan kehumasan dalam menghasilkan karya para anggota dan pimpinan DPRD, atas dasar kebenaran. Dapat disimpulkan bahwa tingkat demokrasi dan pertukaran informasi dalam implementasi kebijakan promosi kerja di Republik Demokratik Korea semakin membaik. Jalin komunikasi dan komunikasi yang baik antar anggota DPRD, Sekretariat DPRD khususnya Bagian Humas, media online Radar Kaur dan Masyarakat umum yang membaca berita harian Kabupaten Kaur. Begitu pula dengan Kabupaten Kaur. keinginan untuk merasakan kebenaran dan kebenaran. Terkait tingkat demokrasi dan pertukaran informasi,

sikap seluruh pemimpin politik adalah tegas, jujur, dan demokratis dalam bekerja, sehingga sangat Tahu cara berbagi informasi.

4. Struktur birokrasi.

SOP Penyelenggaraan Departemen Humas DPRD, menghimpun dan mempublikasikan kegiatan para anggota dan pengurus DPRD. dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kaur, dengan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Hubungan Masyarakat dan Protokol. Bagian ini harus memberikan informasi kepada pegawai dan mitra terkait yang meliputi dan mempublikasikan hasil kerja DPRD. Organisasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan Kantor Hubungan Masyarakat Sekretariat Republik Demokratik Rakyat Korea yang meliputi dan mempublikasikan urusan anggota dan pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea juga dapat dikelola secara efektif.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian (tanggung jawab bersama) juga dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan Bagian Humas Sekretariat DPRD berkembang tanpa kendala. Bagian yang menghimpun dan mempublikasikan hasil karya anggota dan pimpinan DPRD berfungsi normal. Terdapat standar operasional (SOP) dan tanggung jawab pekerjaan yang jelas untuk setiap bagian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Lesmana Rian. 2018. "Element and Factor Governance Innovation in Government Public Service." *Jurnal Baliabangda* 6(3): 207–22.
- Ariany, Ria, and Roni Ekha Putera. 2013. "Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kota Pariaman." *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 29(1): 33.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si, and M.Si Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos. 2015. "ZM_Manajemen_Pelayanan_Publik.Pdf." *Manajemen Pelayanan Publik*: 1–50.
- Edwards, George C. 1984. "Implementing Public Policy : Edwards, George C : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive." *Jai Press Inc.*
- <https://archive.org/details/implementingpubl000edwa/page/n3/mode/2up?view=theater>.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2016. "Challenges of Public Service Quality in Local Government." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 7(1): 15–26.
- Lexy J.Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Nida, Fatma Laili Khoirun. 2014. "Persuasi Dalam Media Komunikasi Massa." *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam "AT-TABSIR"* 2(2): 77–95.
- Ramdhani, Abdullah Ramdhani Muhammad Ali. 2016. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik Vol* 11(January): 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>.
- Sugiyono. 2015. *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: CV.ALFABETA.
- . 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta." *Bandung: Alfabeta.:* 118. Alfabeta.

artikel roni oksuntri

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	12%
2	www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
5	Fani Mega Maulidia. "Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)", Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 2018 Publication	<1%
6	jom.unri.ac.id Internet Source	<1%
7	journals.unihaz.ac.id Internet Source	<1%

8	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
9	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
10	media.neliti.com Internet Source	<1 %
11	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
13	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
14	docplayer.info Internet Source	<1 %
15	ejurnalbalaibahasa.id Internet Source	<1 %
16	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
17	look-better.fun Internet Source	<1 %
18	rapik.pubmedia.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

artikel roni oksuntri

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
